

**DUKUNGAN INDONESIA TERHADAP PENYELESAIAN MASALAH
PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK DI PALESTINA PADA MASA
PEMERINTAHAN JOKO WIDODO (2014 – 2016)**

*Indonesian Support On Problems Solution Of Children's Protection And Welfare In
Palestine During Joko Widodo's Governance (2014-2016)*

Oleh

Aryanigtyas Palupi Nurfauzy

20130510054

Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammdiyah Yogyakarta

ABSTRACT

Republic of Indonesia (RI) is a country that since its independence has been actively promoting world peace. It is in compliance with the 1945 constitution of Indonesia. Before Joko Widodo officially take the position as president, he has actively promote support for the world peace. One of them is the support for independence and sovereignty of Palestine. In 2014, Joko Widodo officially inaugurated as the president of Republic of Indonesia. But, in the same year, when Indonesia is in euphoria after the inauguration of the President, Palestine underwent a conflict. This conflict continuously causes victims especially children. In 2014, children that become the target of military force of Israel such as arrest, violence and shootings due to the conflict is arising. It makes President Joko Widodo in the beginning of his governance perform various effort to be able to help Palestine in overcoming the problems of Protection and welfare of the children.

In this thesis, the writer uses secondary data gained from various sources, such as print media as well as internet related to the research such as books, journals, articles, newspaper and reports. Data analysis method used is qualitative data analysis method.

Keywords : Indonesian Support, Children's Protection and Welfare, Joko Widodo Governance (2014-2016)

Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif dalam upaya mewujudkan perdamaian di dunia, yang berarti bahwa Indonesia sangat tidak setuju dengan berbagai bentuk penjajahan di atas dunia. Sebagai negara yang bebas aktif dalam rangka mewujudkan perdamaian di dunia yang berdasar pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Indonesia senantiasa menjalin hubungan luar negeri dengan beberapa negara kawasan di dunia, salah satunya ialah negara Palestina di kawasan Timur Tengah. Hubungan Indonesia dengan Palestina sangatlah erat, hal ini dimulai sejak kedua negara saling mengakui kedaulatannya masing-masing pada awal pengumuman kemerdekaan. Namun, sangat disayangkan meskipun Indonesia telah mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Palestina, hal itu tidak sejalan dengan yang diharapkan kedua negara ini. Tidak sedikit negara di dunia yang masih enggan mengakui kedaulatan Palestina, terlebih ketika Palestina masih dihadapkan pada konflik bersenjata melawan Israel.

Konflik antara Israel dan Palestina dilatarbelakangi oleh klaim dari masing-masing negara atas wilayah yang sama yakni Palestina. Konflik bersenjata yang dihadapi Palestina telah sejak lama terjadi, bahkan hingga saat ini upaya penyelesaian konflik kedua negara masih belum menemukan titik terang. Sudah lebih dari setengah abad bangsa Palestina menghadapi keterpurukan akibat konflik yang terus bergolak di tanah mereka.

Anak-anak merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu negara, karena anak-anak merupakan generasi muda penerus bangsa. Sehingga sangat penting kaitannya dalam memenuhi hak-hak mereka sebagai seorang bangsa dan generasi muda bagi negaranya. Tidak dapat terbayangkan bagaimana jadinya apabila hak-hak yang seharusnya dapat mereka nikmati setidaknya mendapat kejelasan untuk memperoleh hal tersebut dari negara mereka justru dirampas atau bahkan hilang bukan karena kesalahan mereka sendiri.

Hal inilah yang hingga saat ini masih terjadi dan terus dihadapi oleh anak-anak Palestina. Konflik yang berlangsung cukup lama dan upaya penyelesaian yang tak berujung

baik membuat bangsa Palestina khususnya anak-anak kehilangan hak-hak mereka. Konflik Internasional merupakan suatu hal yang tidak jarang terjadi dalam dalam tatanan dunia internasional. Setiap anak dalam merespon dampak konflik bersenjata akan berbeda dengan orang dewasa karena keterbatasan kapasitas dan ketidakmatangan emosional serta fisik mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan yang tengah berkonflik, termasuk memahami alasan politik yang melatarbelakangi konflik tersebut. Bahkan pengalaman merasakan konflik berbeda antara setiap anak, antara anak perempuan dengan anak laki-laki, dan anak sebagai individu maupun sebagai kolektif. Masa anak-anak harusnya mereka lalui dengan penuh keceriaan dimana mereka dapat bermain dan belajar dengan penuh percaya diri dan cinta kasih dari keluarganya. Seolah kita tidak pernah belajar dari kesalahan yang pernah dialami negara lain ketika bangsa di dunia mengklaim diri mereka sebagai bangsa yang beradab padahal perang terus bergolak tak henti-henti di beberapa wilayah. Hal yang sangat menyedihkan dari konflik bersenjata tersebut yakni ketika warga sipil, perempuan, bahkan anak-anak yang tidak mengerti alasan politik dibalik bergolaknya perang harus menjadikan mereka untuk menanggung kesalahan politik dan kesakitan dari dampak yang ditimbulkan akibat perang. Tidak jarang di wilayah konflik anak-anak sering menjadi target untuk direkrut menjadi kombatan perang selain itu mereka juga sering menjadi target penyerangan militer lawan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga anak-anak di wilayah konflik merupakan kelompok yang sangat rentan dalam menghadapi dampak konflik bersenjata. Tidak hanya dalam kondisi memanasnya konflik bersenjata anak-anak menjadi korban, namun juga ketika dalam kondisi tentara Israel melakukan serangan sehari-hari biasa.

Terjadinya serangan militer Israel di Palestina pada tahun 2014 merupakan serangan terbesar, terlama, dan terbanyak dalam merenggut korban jiwa khususnya anak-anak. Serangan ini merupakan serangan yang terbesar setelah pernah dicapainya kesepakatan *Camp David* dalam upaya penyelesaian konflik. Serangan militer ini disebut sebagai *Operation*

Protective Edge oleh militer Israel dan Palestina menyebutnya sebagai gerakan *Intifadhah Al Quds* terjadi selama kurang lebih 51 hari sejak 7 Juli hingga 26 Agustus 2014 (Baruch, 2014, hal. 2).

Anak-anak di Palestina menanggung derita yang tak berkesudahan akibat perang yang dikobarkan oleh rezim Zionis Israel. Data terakhir *Office for The Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA) mencatat dalam *Operation Protective Edge* merupakan serangan yang menyebabkan korban anak-anak paling tinggi sepanjang tahun. Laporan yang didapat melalui OCHA pada periode 28 Agustus sampai dengan 4 September 2014 menyatakan bahwa 11.100 warga Palestina menjadi korban, diantaranya 3.374 merupakan anak-anak, 2.088 perempuan dan 410 orang tua telah terluka. Bahwa hingga 1.000 anak-anak yang terluka akan memiliki cacat permanen dan sekitar 1.500 anak-anak yatim akan membutuhkan dukungan terus-menerus dari sektor perlindungan dan kesejahteraan anak.

Gejolak perang yang terjadi selama 51 hari tidak hanya menelan korban jiwa namun juga menyebabkan berbagai kerusakan pada bangunan-bangunan yang ada di Palestina, tercatat ada dua puluh dua sekolah yang telah hancur total dan 118 sekolah mengalami rusak berat, sekitar 18.000 unit rumah atau 5% saham perumahan di Gaza hancur akibat serangan militer dan tercatat sekitar 108.000 orang tidak memiliki tempat tinggal. Kerusakan ribuan unit rumah ini menyebabkan sekitar 60.812 orang terdaftar sebagai pengungsi di 31 lokasi penampungan yang didirikan oleh *United Nations Relief and Works Agency For Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA) angka tersebut meningkat tajam dibandingkan dengan jumlah pengungsi pada serangan Operasi *Cast Lead* Desember 2008 - Januari 2009.

Dikarenakan meningkatnya jumlah pengungsi yang ada di penampungan UNRWA pemerintah Palestina kemudian berusaha untuk menambah lokasi penampungan dengan menggunakan beberapa rumah yang masih dapat dihuni dan menjadikan bangunan pemerintah seperti dua sekolah yang dialihkan menjadi lokasi penampungan sementara.

Terdapat 50.000 orang yang diperkirakan tinggal dengan keluarga angkat dan 700 orang berlindung di dua sekolah pemerintah (OCHA with humanitarian partners, 2014, hal. 1).

Tidak hanya dalam kondisi konflik memanas yang menyebabkan korban jiwa, tentara Israel juga meluncurkan serangan bertubi-tubi pada hari-hari biasa. Dan data pada tahun 2015 yaitu pada bulan Juli sampai September 2015 sebanyak 165 orang anak mengalami luka tembak (OCHA with humanitarian partners, 2014). Pada tiga bulan terakhir tahun 2015 sebanyak 25 orang anak meninggal dunia akibat tertembak dalam serangan militer Israel, dimana 23 anak (diantaranya 19 anak laki-laki dan 4 anak perempuan) meninggal akibat tembakan yang diluncurkan oleh tentara Israel di kawasan Jerusalem dan Tepi Barat sementara 2 orang lainnya ditembak mati oleh tentara Israel di kawasan Jalur Gaza, dan sebanyak 1.310 anak mengalami luka tembak yang cukup serius (Bannoura, 2016).

Selain menjadi korban dalam serangan militer Israel selama memanasnya konflik, anak-anak juga menjadi korban pelanggaran HAM dalam penangkapan dan penahanan oleh tentara Israel tanpa alasan yang jelas. Pada tahun 2013 sampai dengan akhir bulan Agustus 2014, terkumpul sebanyak 208 kesaksian yang melaporkan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh *Israel Defence Force (IDF)*, *Israel Prison Service (IPS)*, dan *Israel Security Agency (ISA)* terhadap anak-anak Palestina selama berada dibawah tahanan militer Israel dan selama berada dalam proses pemindahan tahanan. Berdasarkan data yang didapat melalui *Global Child Protection* bahwa dari 208 kesaksian tersebut terdapat 139 orang anak yang berusia 16-17 tahun dan 69 anak berusia dibawah 16 tahun yang telah melaporkan pelanggaran tersebut (UNICEF, 2015).

Berbagai bentuk pelanggaran yang dialami oleh anak-anak Palestina ini yakni diantaranya, seratus enam puluh dua anak dilaporkan sedang ditutup matanya dan ditarik secara paksa selama proses pemindahan tempat tahanan. Seratus delapan puluh sembilan anak dilaporkan terluka dipergelangan tangan akibat diikat. Seratus tujuh puluh satu anak

dilaporkan menjadi sasaran kekerasan fisik selama penangkapan, interogasi dan/atau penahanan. Seratus empat puluh empat anak dilaporkan mengalami pelecehan verbal dan intimidasi selama penangkapan, interogasi dan/atau penahanan. Delapan puluh sembilan anak dipindahkan ke tempat tahanan bawah tanah. Tujuh puluh sembilan anak dilaporkan ditangkap di malam hari dan anak ditangkap selama bentrokan atau demonstrasi. Seratus enam puluh tiga anak dilaporkan selama penangkapan tidak diberitahu tentang hak-hak hukum, khususnya hak untuk mendapatkan pembelaan dan hak untuk tetap diam. Dua ratus dua puluh empat anak dilaporkan mengalami penggeledahan hingga ditelanjangi di markas militer Israel. Dua puluh delapan anak dilaporkan menjalani kurungan tersendiri di Al Jalame dan Petah Serikat (situs penahanan di dalam Israel) dan berada di bawah interogasi ISA. Enam tiga anak dilaporkan mengalami pemaksaan untuk menandatangani dokumen pengakuan dalam bahasa Ibrani selama proses interogasi.

United Nations International Children's Fund (UNICEF) juga melaporkan terdapat sejumlah anak Palestina yang menjadi tahanan Zionis Israel pada bulan September 2014 yaitu sebanyak 181 anak (57 orang anak laki-laki dan 125 orang anak perempuan) berusia 14 sampai 17 tahun menjadi tahanan atas dugaan ancaman keamanan. Pada bulan Desember 2015 sebanyak 422 anak yang berusia sekitar 12 sampai 17 tahun menjadi tahanan Zionis Israel. Jumlah anak Palestina yang menjadi tahanan Zionis Israel selalu meningkat sebanyak 219 anak setiap bulannya sekitar 15% pada tahun 2015 (*UNICEF report confirms ill-treatment of Palestinian child detainees remains systematic, 2015*). Pusat Studi Tawanan Palestina juga mengumumkan bahwa penjajah Zionis menyebut anak-anak Palestina yang ditawan sebagai perusak dan teroris. Militer Israel menyiksa anak-anak dan juga menekan mereka agar bersedia menjadi mata-mata Zionis.

Konflik bersenjata memberikan dampak yang begitu besar bagi anak-anak, seperti kekerasan yang berbasis gender, perekrutan menjadi tentara perang, penahanan ilegal,

berpisah dari keluarga, dan menjadi korban perdagangan manusia. Disamping itu banyak anak-anak yang mengalami gangguan psikologi karena menyaksikan penembakan anggota keluarga mereka serta penggeledahan dan pendudukan paksa oleh tentara Israel, sehingga anak-anak mengalami insomnia, depresi, stress, dan trauma yang berkepanjangan dalam hidup mereka.

Bagi anak-anak yang tinggal di daerah sekitar perbatasan, mendengar suara-teriakan orang yang sekarat atau teriakan berkepanjangan akibat kesakitan serta suara-suara rentetan tembakan, bom, dan sejenisnya tentu saja bukanlah harapan mereka. Meskipun anak-anak tersebut banyak disembunyikan di dalam bunker oleh orang tua mereka dengan tujuan perlindungan dan keselamatan, namun efek suara yang terjadi diluar bunker masih dapat terdengar dari dalam bunker tempat mereka bersembunyi. Jika diluar bunker terlalu banyak orang-orang yang sekarat, maka akan dibawa masuk ke bunker tersebut untuk mendapatkan perawatan. Dari sinilah anak-anak dapat melihat dengan mata kepala sendiri tentang mereka yang sekarat, yang kakinya terluka, patah, bahkan hancur akibat terkena bom dan sejenisnya. Suatu kejadian pada tanggal 27 Desember 2008 seorang anak berusia delapan tahun secara tidak sengaja melalui jendela dari dalam rumah menyaksikan kematian ibunya akibat terkena lemparan bom fosfor dari udara yang saat itu dilakukan oleh militer Israel (Santoso B. , 2011, hal. 19-25).

Hidup berselimut kecemasan akan kematian yang mungkin segera menemui mereka dan pemandangan menyakitkan yang nyata dihadapan mereka bukanlah harapan anak-anak Palestina. Banyak diantara anak-anak yang berada didalam bunker tersebut yang mengalami tekanan hidup yang luar biasa. Mereka akan sangat takut dan histeris ketika mendengar ada keributan, terlebih ketika mereka melihat pasukan tentara. Trauma berkepanjangan benar-benar mereka alami, terlalu banyak anak-anak di wilayah perang ketika ditanyai soal nama dan umur oleh sejumlah relawan mereka justru selalu memberikan jawaban yang tidak sesuai

“keluargaku semua mati” hanya itu yang terucap dari bibir mereka. Banyak pula yang hanya diam dengan sorot mata yang kosong menggantung (Kuncahyono, 2009, hal. 220).

Tidak sebatas diarena perang kekerasan yang dilakukan oleh militer Israel terhadap anak-anak di Palestina, namun juga di beberapa sekolah yang mereka harapkan dapat menjadi salah satu tempat yang aman bagi mereka menuntut ilmu justru kerap melakukan kekerasan terhadap beberapa siswanya. Berdasarkan laporan dari Departemen Pendidikan Palestina tahun 2014 sebanyak 76.5% siswa sekolah dasar dan 81.9% siswa sekolah menengah di Palestina mengalami kekerasan di sekolah (Growing Up Between Israeli Settlements and Soldiers, 2014). Selain itu hasil survei yang dilakukan Biro Pusat Statistik Palestina menemukan bahwa 91.5% dari anak-anak Palestina yang berusia satu sampai empat belas tahun telah mendapat hukuman fisik disekolahnya (Ramallah students say "I am here to learn, not to be hit!", 2016)

Definisi tentang anak tertuang dalam UUD Nomor 4 Tahun 1979. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 4 Pasal 1 ayat 2 Tahun 1979, dalam ketentuan umum seorang anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah (Indonesia, 1979). Dalam konteks upaya perlindungan terhadap anak-anak Palestina, sangat penting untuk memperhatikan pandangan Eglantyne Jebb, salah seorang penggagas dibuatnya Deklarasi Hak Anak (*Save The Children and Champion The Children's Rights*) bahwa perlindungan anak ditujukka dalam rangka untuk menangani penyebab bukan hanya dampak dari terjadinya pelanggaran hak-hak anak (Mulley, 2012).

Dalam hal ini maka bentuk-bentuk dukungan Indonesia terhadap penyelesaian masalah perlindungan dan kesejahteraan anak di Palestina pada masa pemerintahan Joko Widodo (2014 – 2016) adalah tindakan persuasi yang berwujud dukungan dalam konfrensi multilateral dan kerjasama program bantuan jangka panjang.

Salah satu wujud semangat Presiden Jokowi dalam memberikan perhatian kepada bangsa Palestina yakni melalui KTT Luar Biasa OKI. Indonesia secara khusus ditunjuk oleh Palestina untuk menjadi tuan rumah bagi pelaksanaan KTT Luar Biasa OKI pada tanggal 6 - 7 Maret di Jakarta Convention Centre (JCC). KTT tersebut secara khusus membahas isu nasib bangsa Palestina agar bisa menjadi negara yang berdaulat. Disebut sebagai KTT Luar Biasa OKI karena Konferensi ini diadakan diluar dari jadwal pertemuan tahunan OKI. Tema dalam pertemuan KTT ini yaitu *United for a just Solution* dengan maksud agar adanya persatuan baik dari Palestina itu sendiri maupun dari OKI dalam mendukung penyelesaian masalah Palestina. KTT ini menjadi pertemuan internasional besar kedua yang digelar di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo usai di tahun sebelumnya Indonesia menggelar Konferensi Asia Afrika (KAA).

Dalam KTT Luar Biasa ini, Indonesia mengundang 56 negara anggota, 4 negara pengamat, dan 4 pihak yang terlibat dalam proses perdamaian Palestina – Israel. Indonesia juga menginisiasi dibuatnya dua dokumen penting yakni Resolusi yang menegaskan kembali posisi prinsip serta komitmen OKI terhadap Palestina dan Al-Quds Al-Sharif dan Dokumen Deklarasi Jakarta yang kemudian disahkan dan menjadi hasil dari pertemuan KTT Luar Biasa OKI 2016. Secara umum Resolusi Al-Quds Al-Sharif ini berisi tentang *political core* dari negara-negara anggota OKI, terhadap isu Palestina Al Quds, Al Syarif. Sedangkan Deklarasi Jakarta sebagai inisiatif Indonesia, yang memuat rencana aksi konkret dari *political core* yang terkandung dalam Resolusi Al-Quds Al-Sharif atau tindak lanjut para pemimpin OKI untuk penyelesaian isu Palestina dan Al-Quds Al-Sharif (Waluyo, 2016).

Inisiatif yang dilakukan Indonesia dalam merumuskan Resolusi Al-Quds Al-Sharif dan Deklarasi Jakarta tentu saja disadari sebagai usaha yang tidak mudah. Karen seperti yang kita tahu bahwa selama ini Israel selalu bersikap acuh tak acuh terhadap berbagai kecaman dunia yang ditunjukkan kepada dirinya.

Berbagai langkah dan tindakan dilakukan sebagai bentuk keseriusan Indonesia dalam upaya membantu penyelesaian permasalahan anak di Palestina. Indonesia memberikan bantuan bagi Palestina dengan melanjutkan program kerjasama yang telah berlangsung sejak lama, yakni dalam penguatan kerja sama di bidang pendidikan dan pembangunan sosial. Hal ini merupakan upaya Indonesia untuk menganani masalah kesejahteraan anak yang dihadapi Palestina. Bagi Indonesia sendiri dengan melanjutkan pemberian bantuan dalam kerjasama bidang pendidikan seperti pemberian beasiswa dan pelatihan teknis, diharapkan secara tidak langsung dapat membantu generasi muda khususnya anak-anak Palestina untuk terhindar dari segala bentuk kerugian serta dampak yang ditanggung akibat konflik bersenjata di wilayah mereka dan membangun kesejahteraan bagi anak-anak Palestina. Indonesia percaya bahwa dengan berfokus pada pemberian bantuan seperti bidang pendidikan dan pembangunan sosial di berbagai program hal tersebut akan dapat memenuhi kebutuhan generasi muda Palestina yang akan menghadapi berbagai tantangan kedepannya.

Kerjasama kedua negara tersebut tertuang melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding between the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Education and Higher Education of the State of Palestine on Education Cooperation* (Hubungan Bilateral Indonesia - Palestina). Kerja sama di bidang pendidikan antara Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Palestina tertuang dalam *MoU*, tentang kerja sama pendidikan dan pelatihan dalam hubungan diplomatik. *MoU* tersebut pertama kali ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2007 dan telah diamandemen serta secara resmi ditandatangani pada 28 Februari 2014. Pada tahun 2014 Indonesia telah menghabiskan dana sekitar USD 1.198M untuk pelaksanaan program *capacity building* dimana anggaran tersebut berasal dari perpaduan anggaran Indonesia, *Development partner/donor*, dan juga *Partner Countries* (Dicky Sofjan, Thomas Beloe, 2014). Data terbaru menyatakan bahwa

sampai pada bulan Agustus 2016 tercatat 1774 orang Palestina yang mendapatkan manfaat dari pelaksanaan program *capacity building* RI untuk Palestina.

Beberapa sektor yang telah disepakati kedua negara pada program *capacity building* ini yaitu, dalam sektor pembangunan sosial, Indonesia menawarkan berbagai program pemberdayaan perempuan, rehabilitasi vokasional bagi penyandang cacat, dan pengembangan generasi muda. Dalam sektor ekonomi, Indonesia menawarkan beberapa skema *capacity building* yang telah dirancang untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah di Palestina. Dalam sektor pengembangan infrastruktur Indonesia menawarkan program pelatihan mengenai siklus proyek seperti pelatihan pengelolaan berbagai fase proyek secara menyeluruh. Selain itu Indonesia juga menawarkan proyek yang meliputi wilayah seperti perbankan syariah, teknologi informasi, akuakultur, pertanian, budaya dan pariwisata. Dalam sektor pemerintahan, Indonesia menawarkan proyek *capacity building* di bidang diplomasi, keamanan dan perencanaan pembangunan. Dalam hal pelatihan petugas Layanan Luar Negeri Palestina, Indonesia menawarkan untuk berbagi pengalaman dalam perjuangan diplomatik.

Berbagai program pelatihan ini tidak hanya dilaksanakan oleh Keementrian Luar Negeri RI, namun juga melalui kerjasama dengan berbagai lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Seperti menjalin kerjasama dengan universitas-universitas negeri dan swasta serta lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang bergerak dibidang kesehatan, sosial, dan kemanusiaan.

Daftar Pustaka

- Bannoura, S. (2016, Mei 15). *UNICEF: "Israeli Soldiers Killed 25 Palestinian Children In Last Three Months of 2015"*. Retrieved Februari 18, 2017, from International Middle East Media Center: <http://imemc.org/article/unicef-israeli-soldiers-killed-25-palestinian-children-in-last-three-months-of-2015/>
- Baruch, P. S. (2014). *Operation Protective Edge: Legality and Legitimacy*. INSS Insight No. 577.
- Dicky Sofjan, Thomas Beloe. (2014). *South-South and Triangular Cooperation (SSTC)*. Jakarta: United Nations Development Programme (UNDP).
- (2014). *Growing Up Between Israeli Settlements and Soldiers*. Defense for Children International Palestine.
- Hubungan Bilateral Indonesia - Palestina*. (n.d.). Retrieved Desember 13, 2016, from Kedutaan Besar Republik Indonesia: <http://www.kemlu.go.id/amman/id/Pages/Palestina.aspx>
- Indonesia, R. (1979). *UUD RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*.
- Kuncahyono, T. (2009). *Jalur Gaza Tanah Terjanji, Intifadah, dan Pembersihan Etnis*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Mulley, C. (2012, Agustus 19). *Eglantyne Jebb, 1876-1928, Founder of Save the Children and champion of children's rights*. Retrieved Februari 25, 2017, from Her Storia: <http://herstoria.com/eglantyne-jebb-1876-1928-founder-of-save-the-children-and-champion-of-childrens-rights/>
- OCHA with humanitarian partners. (2014). *Occupied Palestinian Territory: Gaza Emergency*. Palestin: UNOCHA.
- Palestine, D. f. (2014). *Growing Up Between Israeli settlements and soldiers*. Palestine: Defense for Children International Palestine.

Posisi OKI Mengenai "Boikot" Terhadap Produk Israel Dari/Di Wilayah Pemukiman Ilegal.

(2016, Maret 8). Retrieved Februari 24, 2017, from Kementrian Luar Negeri Republik

Indonesia: <http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/jokowi-boycott-israel-.aspx>

Ramallah students say "I am here to learn, not to be hit!". (2016, Desember 9). Retrieved

Desember 28, 2016, from West Bank Settler and Soldier Violence: [http://www.dci-](http://www.dci-palestine.org/ramallah-students-say-i-am-here-to-learn-not-to-be-hit)

[palestine.org/ramallah-students-say-i-am-here-to-learn-not-to-be-hit](http://www.dci-palestine.org/ramallah-students-say-i-am-here-to-learn-not-to-be-hit)

Rimadi, L. (2016, Maret 9). *Dibalik Seruan Jokowi Boikot Produk Israel*. Retrieved Februari

25, 2017, from Liputan6 News: [http://news.liputan6.com/read/2454797/di-balik-seruan-](http://news.liputan6.com/read/2454797/di-balik-seruan-jokowi-boikot-produk-israel)

[jokowi-boikot-produk-israel](http://news.liputan6.com/read/2454797/di-balik-seruan-jokowi-boikot-produk-israel)

Santoso, B. (2011). *Kisah-kisah Kekejaman Israel di Palestina*. Jogjakarta: IRCiSoD.

UNICEF. (2015, Februari). Children in Israeli Military Detention. *Observation and*

Recomendation , p. 3.

UNICEF report confirms ill-treatment of Palestinian child detainees remains systematic.

(2015, Februari 21). Retrieved Februari 18, 2017, from Defense For Children International

Palestine: [http://www.dci-](http://www.dci-palestine.org/unicef-report-confirms-ill-treatment-of-palestinian-child-detainees-remains-systematic)

[palestine.org/unicef_report_confirms_ill_treatment_of_palestinian_child_detainees_remains_systematic](http://www.dci-palestine.org/unicef-report-confirms-ill-treatment-of-palestinian-child-detainees-remains-systematic)

Waluyo, A. (2016, Maret 2). *Pertemuan KTT Luar Biasa OKI Hasilkan Deklarasi Jakarta.*

Retrieved Februari 24, 2017, from VOA Indonesia:

<http://www.voaindonesia.com/a/pertemuan-ktt-luar-biasa-oki-akan-hasilkan-deklarasi-jakarta/3215988.html>